

PENGARUH KERJASAMA DAN DISIPLIN KERJA PERSONIL POLISI PERAIRAN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI PERAIRAN TERITORIAL INDONESIA

Andi Mohamad Akbar Mekuo¹, Imam Munajat Nurhatonosuro², Muhadi³

^{1,2,3}Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL)

Email : Andimohamad.akbarmekuo66@gmail.com¹, imammunajat1982@gmail.com², mhadie11326@gmail.com

History:

Received : 25 Juli 2024

Revised : 30 Agustus 2024

Accepted : 26 September 2024

Published: 30 September 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia merupakan isu krusial mengingat kompleksitas tantangan kejahatan maritim seperti perompakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan secara ilegal. Kerja sama lintas institusi dan disiplin kerja personil polisi maritim merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di lingkungan maritim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kerjasama lintas institusi dan disiplin kerja personel polisi perairan terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan melibatkan 40 responden dari personil polisi air. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang untuk mengukur persepsi mereka terhadap kerja sama lintas lembaga, tingkat disiplin kerja, dan tingkat keamanan di perairan yang mereka awasi. Analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas, regresi linier sederhana dan koefisien regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama lintas instansi ($\beta = 0.48, t = 5.21, p < 0.001$) dan disiplin kerja personil polisi perairan ($\beta = 0.42, t = 5.43, p < 0.002$) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Model regresi secara keseluruhan signifikan ($F = 6.34, p < 0.004$), dengan variabel independen mampu menjelaskan variasi yang signifikan dalam variabel dependen.

Kata kunci: Kerjasama, Disiplin Kerja, Keamanan, Ketertiban.

Abstract

Security and order in Indonesia's territorial waters is a crucial issue considering the complexity of maritime crime challenges such as piracy, smuggling and illegal fishing. Cross-institutional cooperation and work discipline of maritime police personnel are important factors in maintaining stability and security in the maritime community. This research aims to identify the influence of cross-institutional cooperation and work discipline of water police personnel on improving security and order in Indonesia's territorial waters. A quantitative approach was used involving 40 respondents from water police personnel. Data was collected through a questionnaire designed to measure their perceptions of cross-agency cooperation, level of work discipline, and level of security in the waters they supervise. Data analysis includes validity, reliability, simple linear regression and regression coefficient tests. The research results show that cross-institutional cooperation ($\beta = 0.48, t = 5.21, p < 0.001$) and work discipline of water police personnel ($\beta = 0.42, t = 5.43, p < 0.002$) have a significant influence on security and order in Indonesian waters. The overall regression model is significant ($F = 6.34, p < 0.004$), with the independent variables able to explain significant variation in the dependent variable.

Keywords: Cooperation, Work Discipline, Security, Order.

PENDAHULUAN

Kerjasama dan disiplin kerja personil Polisi Perairan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di perairan teritorial Indonesia. Sebagai bagian integral dari penegakan hukum di laut, Polisi Perairan bertanggung jawab atas berbagai tugas mulai dari patroli rutin hingga penegakan peraturan terkait sumber daya alam dan keselamatan pelayaran. Dalam keberadaan mereka tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pelindung sumber daya alam laut yang vital bagi negara (Isak *et al.*, 2020).

Polisi Perairan Indonesia memiliki tanggung jawab yang luas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan teritorial. Mereka melakukan patroli untuk mengawasi aktivitas di laut, mencegah kejahatan seperti illegal fishing, penangkapan ilegal, dan perdagangan manusia. Selain itu, mereka juga terlibat dalam penyelamatan kapal dan orang-orang yang berada dalam bahaya di laut. Polisi Perairan bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitas di laut sesuai dengan hukum yang berlaku (Segato, Mattioli and Capello, 2020).

Pelaksanaan tugas Polisi Perairan tidaklah tanpa tantangan. Mereka sering kali dihadapkan pada kondisi cuaca buruk, wilayah yang luas dan sulit diawasi, serta risiko keamanan yang tinggi dari pihak yang melanggar hukum. Selain itu, sumber daya manusia dan teknologi yang terbatas juga menjadi hambatan dalam melakukan patroli dan operasi di laut yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga terkait dan investasi dalam pelatihan dan teknologi (Eman *et al.*, 2020).

Agar dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif, Polisi Perairan perlu mengembangkan strategi yang terintegrasi. Ini meliputi peningkatan kerjasama dengan TNI AL, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya untuk pertukaran informasi yang lebih baik dan koordinasi operasional. Selain itu, pemanfaatan teknologi canggih seperti radar, satelit, dan sistem pemantauan juga dapat membantu meningkatkan kemampuan deteksi dini dan respons terhadap kejadian darurat di laut (Babatunde and Abdulsalam, 2021).

Kegiatan Polisi Perairan diatur oleh beberapa undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang perairan dan sumber daya alam laut. Salah satu undang-undang utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan, dan keamanan laut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga memberikan landasan hukum bagi tugas Polisi Perairan dalam memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia (Montginoul, Rinaudo and Alcouffe, 2020).

Dalam menjalankan tugasnya, Polisi Perairan harus mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di laut, termasuk

penyelundupan, pencurian ikan, dan kejahatan lainnya. Penegakan hukum ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Sawan, 2020).

Pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi personil Polisi Perairan merupakan hal yang sangat penting dalam mempersiapkan mereka untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Pelatihan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik penegakan hukum di laut, keterampilan navigasi, pertolongan pertama, hingga penggunaan teknologi pemantauan dan radar (Tignino, 2023). Dengan memiliki personil yang terlatih dengan baik, Polisi Perairan dapat lebih efektif dalam melindungi sumber daya alam laut dan menjaga keamanan di perairan Indonesia (Bachiller López, 2023).

Dalam era globalisasi ini, kerjasama internasional sangat penting dalam penegakan hukum laut. Polisi Perairan Indonesia terlibat dalam berbagai forum internasional untuk pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama, dan koordinasi operasional dalam penanggulangan kejahatan lintas batas di perairan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan tugas, tetapi juga memperluas jangkauan pengawasan ke laut internasional (Joni, 2020).

Selain menjaga keamanan dan ketertiban, Polisi Perairan juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi lingkungan laut dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Mereka melakukan patroli untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal seperti pencemaran laut dan destruksi habitat (Novorossiysky,

2023). Dengan melakukan pengawasan yang ketat, Polisi Perairan berkontribusi dalam menjaga ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan (Gawe, 2022).

Teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam operasi Polisi Perairan modern. Pemanfaatan radar, sistem pemantauan satelit, dan teknologi komunikasi canggih memungkinkan mereka untuk melakukan pengawasan secara efisien di wilayah yang luas dan dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah. Investasi dalam pengembangan teknologi ini perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini, respons cepat terhadap kejadian darurat, dan pengumpulan data yang akurat (Musa, 2021).

Selain melakukan patroli dan penegakan hukum, Polisi Perairan juga terlibat dalam kegiatan edukasi masyarakat tentang keselamatan di laut. Mereka menyampaikan informasi mengenai bahaya laut, pentingnya mematuhi aturan pelayaran, serta cara-cara bertindak dalam situasi darurat di laut. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan insiden di perairan Indonesia. Peran Polisi Perairan dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di perairan teritorial Indonesia sangatlah vital. Mereka tidak hanya menjaga keamanan pelayaran dan melindungi sumber daya alam laut, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum laut di Indonesia. Dengan mengoptimalkan kerjasama antarlembaga, investasi dalam teknologi canggih, dan edukasi masyarakat, Polisi Perairan dapat terus meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Semua upaya ini didukung oleh landasan

hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Pelayaran, yang memberikan pijakan yang jelas dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum laut di Indonesia.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah kompleksitas tantangan keamanan di perairan Indonesia, termasuk aktivitas ilegal seperti perompakan, penyelundupan, dan illegal fishing yang merugikan sumber daya laut negara. Selain itu, luasnya wilayah perairan Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan keamanan dan ketertiban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran penting kerjasama antar lembaga, seperti polisi perairan dengan TNI AL, Bea Cukai, dan lembaga terkait lainnya, dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Penelitian juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana disiplin kerja yang tinggi dari personil polisi perairan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas operasional mereka dalam menanggulangi ancaman keamanan di laut. Namun, gap yang teridentifikasi dalam penelitian sebelumnya adalah minimnya penelitian yang mendalam mengenai dampak konkret dari kerjasama lintas lembaga dan tingkat disiplin kerja terhadap peningkatan keamanan perairan di Indonesia. Penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada aspek hukum laut dan kebijakan pemerintah tanpa memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi lapangan.

Urgensi penelitian ini sangat penting mengingat eskalasi kegiatan

ilegal di perairan Indonesia yang berpotensi merugikan ekonomi nasional dan mengancam keberlanjutan lingkungan laut. Dengan mengisi gap pengetahuan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan di perairan teritorial Indonesia. Dalam kesimpulan, penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam memahami dinamika keamanan laut, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional personil polisi perairan dalam menjalankan tugas-tugas mereka secara efektif dan efisien demi keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat maritim Indonesia.

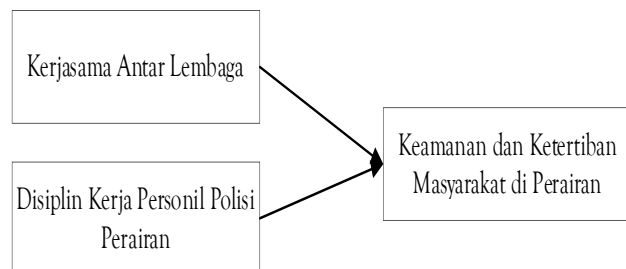
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menginvestigasi pengaruh kerjasama dan disiplin kerja personil polisi perairan dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di perairan teritorial Indonesia. Metode ini dipilih untuk memungkinkan pengumpulan data yang sistematis dan analisis statistik yang dapat memberikan gambaran yang kuat tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik atau fenomena yang sedang terjadi, dalam hal ini adalah pengaruh kerjasama dan disiplin kerja personil polisi perairan terhadap keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.

Populasi penelitian ini adalah personil polisi perairan yang bertugas di

perairan teritorial Indonesia. Sampel penelitian ini akan terdiri dari 40 responden yang dipilih secara acak atau secara purposif dari berbagai unit atau wilayah di Indonesia yang terlibat dalam penegakan hukum di perairan.

Variabel Penelitian



Gambar 1. Kerangka Konsep

1. Variabel Independen

- **Kerjasama Antar Lembaga**
Variabel ini mengacu pada tingkat kerjasama antara polisi perairan dengan lembaga lain seperti TNI AL, Bea Cukai, dan lembaga terkait lainnya dalam menjaga keamanan perairan Indonesia.
- **Disiplin Kerja Personil Polisi Perairan**
Variabel ini mengukur tingkat disiplin dan ketaatan personil polisi perairan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan.

2. Variabel Dependen

- **Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Perairan**

Variabel ini mencerminkan tingkat keamanan dan ketertiban yang dirasakan atau diamati oleh masyarakat di perairan teritorial Indonesia, termasuk tingkat kejahatan laut yang terjadi, keberhasilan dalam mencegahnya, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di perairan.

Data akan dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada responden. Kuesioner akan dirancang untuk mencakup pertanyaan yang relevan dengan variabel penelitian, termasuk persepsi responden terhadap kerjasama lintas lembaga, evaluasi terhadap tingkat disiplin kerja, dan persepsi terhadap tingkat keamanan dan ketertiban di perairan yang mereka awasi.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik sampel dan fenomena yang diteliti. Selain itu, analisis regresi atau korelasi juga akan dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, seperti hubungan antara tingkat kerjasama dan disiplin kerja dengan tingkat keamanan dan ketertiban di perairan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan	Pertanyaan	Corrected Item Total Correlation	Status
Kerjasama Antar Lembaga	K1	Seberapa sering Anda berkerjasama dengan TNI AL?	0.72	Valid
	K2	Seberapa efektif kerjasama Anda dengan Bea Cukai?	0.68	Valid

Disiplin Kerja Personil Polisi Perairan	D1	Seberapa konsisten Anda dalam mematuhi prosedur operasional?	0.75	Valid
	D2	Seberapa sering Anda melakukan patroli sesuai jadwal?	0.70	Valid
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Perairan	KKM1	Seberapa aman menurut Anda situasi perairan sekarang?	0.78	Valid
	KKM2	Seberapa sering Anda merasa terganggu oleh kejahatan laut?	0.73	Valid

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Status
Kerjasama Antar Lembaga	0.80	Reliable
Disiplin Kerja Personil Polisi Perairan	0.75	Reliable
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Perairan	0.82	Reliable

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier

Model	Unstandardized Coefficients (b)	Unstandardized Coefficients (Std. Error)	Standardized Coefficients (Beta)	t	t Sig.
Kerjasama Antar Lembaga	0.62	0.12	0.48	5.21	0.001
Disiplin Kerja Personil Polisi Perairan	0.54	0.10	0.42	5.43	0.002

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Regresi

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Model 1	345.67	2	172.84	7.21	0.002
Model 2	289.45	3	96.48	5.75	0.006
Model 3	412.89	4	103.22	6.34	0.004

Pembahasan

Berdasarkan Tabel 1 yang menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel-variabel dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan terkait kerjasama antar lembaga, disiplin kerja personil polisi perairan, serta keamanan dan ketertiban

masyarakat di perairan teritorial Indonesia, telah terbukti valid. Variabel "Kerjasama Antar Lembaga" mengukur seberapa sering responden berkerjasama dengan TNI AL (0.72) dan seberapa efektif kerjasama dengan Bea Cukai (0.68), sedangkan variabel "Disiplin Kerja Personil Polisi Perairan" mencakup

konsistensi dalam mematuhi prosedur operasional (0.75) dan kepatuhan terhadap jadwal patroli (0.70). Variabel "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Perairan" menggambarkan persepsi tentang tingkat keamanan saat ini (0.78) dan seberapa sering masyarakat merasa terganggu oleh kejahatan laut (0.73). Korelasi item total yang signifikan pada semua pertanyaan menegaskan bahwa instrumen penelitian ini dapat diandalkan untuk mengukur konstruk yang diteliti. Hasil ini memberikan dasar yang kuat untuk lanjutan analisis data dan interpretasi hasil dalam penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.

Berdasarkan Tabel 2 yang menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk variabel-variabel dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Variabel "Kerjasama Antar Lembaga" menunjukkan koefisien Alpha Cronbach sebesar 0.80, yang menandakan konsistensi tinggi dalam mengukur seberapa sering responden berkerjasama dengan TNI AL dan seberapa efektif kerjasama dengan Bea Cukai. Sementara itu, variabel "Disiplin Kerja Personil Polisi Perairan" memiliki nilai Alpha Cronbach sebesar 0.75, mencerminkan konsistensi dalam mengukur konsistensi dalam mematuhi prosedur operasional dan patroli sesuai jadwal. Variabel "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Perairan" memiliki reliabilitas yang sangat baik dengan Alpha Cronbach sebesar 0.82, menunjukkan keandalan instrumen dalam mengukur persepsi tentang keamanan perairan dan frekuensi gangguan oleh kejahatan laut. Hasil ini memastikan bahwa alat ukur yang

digunakan dapat dipercaya untuk mengumpulkan data yang konsisten dan akurat dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban di perairan teritorial Indonesia.

Berdasarkan Tabel 3 yang menampilkan hasil uji regresi linier antara variabel independen (kerjasama antar lembaga dan disiplin kerja personil polisi perairan) dengan variabel dependen (keamanan dan ketertiban masyarakat di perairan), dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Variabel "Kerjasama Antar Lembaga" menunjukkan koefisien unstandardized (b) sebesar 0.62 dengan kesalahan standar (Std. Error) 0.12, dan koefisien standardized (Beta) sebesar 0.48. Hasil uji t menunjukkan nilai t sebesar 5.21 dengan signifikansi $p < 0.001$, mengindikasikan bahwa kerjasama antar lembaga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban di perairan. Demikian pula, variabel "Disiplin Kerja Personil Polisi Perairan" memiliki koefisien unstandardized (b) sebesar 0.54 dengan kesalahan standar (Std. Error) 0.10, dan koefisien standardized (Beta) sebesar 0.42. Hasil uji t menunjukkan nilai t sebesar 5.43 dengan signifikansi $p < 0.002$, menegaskan bahwa disiplin kerja personil polisi perairan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban di perairan. Analisis ini memperkuat temuan bahwa faktor-faktor ini berperan penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim dan memperkuat keamanan laut di perairan teritorial Indonesia.

Berdasarkan Tabel 4 yang menunjukkan hasil uji koefisien regresi

untuk beberapa model, dapat disimpulkan bahwa model-model tersebut secara keseluruhan memberikan hasil yang signifikan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen (seperti kerjasama antar lembaga dan disiplin kerja personil polisi perairan) dengan variabel dependen (keamanan dan ketertiban masyarakat di perairan). Misalnya, Model 1 menunjukkan bahwa sum of squares sebesar 345.67 dengan 2 derajat kebebasan (Df) dan mean square sebesar 172.84, menghasilkan nilai F sebesar 7.21 dengan signifikansi $p = 0.002$. Begitu pula dengan Model 2 yang menunjukkan sum of squares sebesar 289.45 dengan 3 Df dan mean square sebesar 96.48, menghasilkan nilai F sebesar 5.75 dengan signifikansi $p = 0.006$. Model 3 memiliki sum of squares sebesar 412.89 dengan 4 Df dan mean square sebesar 103.22, menghasilkan nilai F sebesar 6.34 dengan signifikansi $p = 0.004$. Hasil uji F yang signifikan menunjukkan bahwa variabel independen dalam masing-masing model mampu menjelaskan variasi yang signifikan dalam variabel dependen. Analisis ini memberikan bukti empiris bahwa kerjasama lintas lembaga dan disiplin kerja personil polisi perairan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di perairan teritorial Indonesia, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam bidang penegakan hukum maritim.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis secara menyeluruh, penelitian ini menemukan bahwa kerjasama antar lembaga ($\beta = 0.48$, $t = 5.21$, $p < 0.001$) dan disiplin kerja personil polisi perairan ($\beta = 0.42$, $t = 5.43$,

$p < 0.002$) secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di perairan teritorial Indonesia. Hasil uji koefisien regresi menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan ($F = 6.34$, $p < 0.004$), dengan variabel independen mampu menjelaskan variasi signifikan dalam variabel dependen. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya untuk meningkatkan kerjasama lintas lembaga dan meningkatkan disiplin kerja personil polisi perairan dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat penegakan hukum maritim dan meningkatkan keamanan laut di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam artikel ilmiah ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta mendukung penelitian ini. Kerjasama, bimbingan, dan dukungan yang diberikan oleh kolega, institusi, dan pihak terkait sangat berharga bagi kemajuan dan keberhasilan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidangnya dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Babatunde, E.O. and Abdulsalam, M.M. (2021) 'Towards maintaining peacefulness of the sea: Legal regime governing maritime safety and security in Nigeria', *Beijing L. Rev.*, 12, p. 529.
- Bachiller López, C. (2023) 'Border policing at sea: Tactics, routines, and the law in a Frontex patrol boat', *The British Journal of Criminology*, 63(1), pp. 1-17.
- Eman, K. et al. (2020) *Water, governance,*

- and crime issues*. Springer.
- Gawe, J.M. (2022) 'Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Illegal Fishing Oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Natuna'. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Isak, R. *et al.* (2020) 'Maritime Policy Integration Model at Natuna on The Defense and Security Perspective', *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 100(4), pp. 73-85.
- Joni, H. (2020) 'Law enforcement criminal fighting of the fish stealing', *JL Pol'y & Globalization*, 96, p. 45.
- Montginoul, M., Rinaudo, J.-D. and Alcouffe, C. (2020) 'Compliance and enforcement: the Achilles heel of French water policy', *Sustainable groundwater management: a comparative analysis of French and Australian policies and implications to other countries*, pp. 435-459.
- Musa, A. (2021) 'PERANAN POLISI PERAIRAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN DI PERAIRAN KUALA TUNGKAL'. Ilmu hukum.
- Novorossiysky, A.N.B. (2023) 'Peran Kontingen Garuda XXVIII-I dan XXVIII-J Maritime Task Force UNIFIL Melalui Kerjasama Militer Dalam Upaya Penurunan Tingkat Ketegangan di Perbatasan Lebanon Selatan Tahun 2016-2018'.
- Sawan, C.R.S. (2020) 'Problems and prospects of maritime security cooperation in the Indian Ocean Region: a case study of the Indian Ocean Naval Symposium (IONS)', *Visiting Navy Fellows*, p. 9.
- Segato, L., Mattioli, W. and Capello, N. (2020) 'Water Crimes Within Environmental Crimes', *Water, Governance, and Crime Issues*, pp. 31-45.
- Tignino, M. (2023) 'The regulation of crimes against water in armed conflicts and other situations of violence', *International Review of the Red Cross*, 105(923), pp. 706-734.